

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

B. Buku

Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Amiruddin, A.Zainal.,(2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada

Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Asyhadie, H. Z., Sh, M., & Rahmawati Kusuma, S. H. (2019). *Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia*. Prenada Media.

Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Hukum Ketenagakerjaan*. Scopindo Media Pustaka

Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

Fuady, M. (2005). *Hukum Pailit dalam teori dan praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara

Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Sinar Grafika.

- Hutagalung, S. M. (2022). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Sinar Grafika
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Khairi, M., Nurjannah, S., Listyaningrum, N., & Akim, I. (2021). *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Deepublish
- Low, N., & Gleeson, B. (2021). *Politik Hijau: Landasan Keadilan*. Nusamedia
- Marthalia, D., Baren Sipayung, S. H., MAP, C., Syarifuddin, M. I., Nurul Fadhillah, S. S. T., Susilo, I. D., ... & Wendy Liana, S. T. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*. Cendikia Mulia Mandiri
- Nainggolan, D. B., & Sh, M. (2023). *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*. Penerbit Alumni.
- Nugroho, S. A., & Sh, M. H. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Kencana
- Oksidelfa, Y. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Purwosutjipto, H. M. N. (2002). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia*
- Remy, S. S. (2009). *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media.
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)*. Kencana
- Yani, A., & Widjaja, G. (2002). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

C. Jurnal

- Ababil, M. A., & Tombi, J. T. N. H. (2025). Perlindungan Kreditur Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Norma Hukum Dan Kenyataan. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 38-53.
- Afiyah, S. (2021). Pembayaran Upah Buruh Perusahaan Yang Pailit Akibat Pandemi Covid-19. *Humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(2), 121-129.
- Ahmadin, A. (2023). *Legal Protection of The Providing Wages to Labor Workers by Companies Affected by Bankruptcy*. *Jurnal Pendidikan Ips*, 13(2), 284-292.
- Al Mufti, M. Z. (2016). Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar. *Lex Renaissance*, 1(1), 6-6.
- Arapenta, D. C., Karsona, A. M., & Sari, D. Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sebagai Kreditur Istimewa. *Jurnal Usm Law Review*, 7(3), 2054-2069.
- Azarine, C. E., Gultom, E., & Sudaryat, S. (2025). Perlindungan Hukum atas Kepastian Pembayaran Kepada Kreditur Konkuren dalam Kepailitan. Solusi Bersama: Jurnal Pengabdian dan Kesejahteraan Masyarakat, 2(2), 80-92.
- Balqis, A., Syakila, N. P., Fauza, B. V., & Berlian, N. (2023). Pembebanan Hak Tanggungan Dan Hipotik Kepada Debitur Sebagai Bentuk Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur. *Diponegoro Private Law Review*, 9(1), 1-17.
- Banjarnahor, D. N., & Banjarnahor, D. (2021). Implementasi Pembayaran Upah Pekerja pada Perusahaan yang Mengalami Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 124/K/Pdt. Sus/2011 pada Kasus PT. Istaka Karya). *TAHKIM*, 17(2), 305-315.
- Basofi, M. B., & Fatmawati, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1), 77-86.
- Budijanto, O. W. (2017). Upah layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 395-412.

- Candini, T. A., & Alka, R. (2022). Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Gloria Justitia*, 2(2), 181-193.
- Citra, H., Wahyuni, S., Fauzi, E., & Adbaida, A. (2024). *Legal Certainty Regarding Buyback Guarantees in Banking Agreements*. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 4(1), 184-190.
- Damlah, J. (2017). Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Crimen*, 6(2).
- Dana, A. R. (2024). Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hak Pekerja Pasca Pailit. *Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hak Pekerja Pasca Pailit*, 14(2), 35-51.
- Dewi, K. S., & Markeling, I. K. (2018). Kedudukan Utang Upah Pekerja Dalam Kepailitan. *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*, 6(02).
- Dewi, N. P. T., & Budiarta, I. N. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 159-163.
- Fachrurrahman, I., Anggraeni, H. Y., & Wahyuni, F. (2021). Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas Upah Pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. *PEMULIAAN HUKUM*, 4(1), 35-42.
- Fauziah, S. N., & Herawaty, V. (2023). Pengaruh Bisnis Strategi, *Market Effect*, dan Manajemen Laba terhadap Risiko Kebangkrutan dengan Pandem Covid-19 sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1209-1218.
- Hanifan, A. A., & Sudahnan, S. (2014). Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya di Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Pailit. *Perspektif*, 19(2), 81-93.
- Harniwati, H. (2021). Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/Pmk. 010/2012. *Ensiklopedia of Journal*, 3(4), 97-104.
- Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 720-732.

- Iftitah, A., Puspitasari, N. R., Yulianti, N., Putra, M. T. P., & Kunarso, K. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(2), 31-46.
- Ismail, A. (2022). Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 44-57.
- Iswahyudi, B., Effendi, D., Imawijaya, R. A. P., & Puspitasari, D. (2020). Kepastian Hukum Bagi Tenaga Kerja atas Penangguhan Upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(2), 192-204.
- Kurniawan, R. (2013). Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 687-704.
- Kurniawan, R. (2013). Harmonisasi Hukum Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Pailit Ditinjau Dari Perspektif Pancasila Sila Ke Lima. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 687-704.
- Kusumadewi, D. P. (2024). Peranan Kurator Dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbata (Studi Kasus Pt Ny. Meneer). *Jurnal Hukum Statuta*, 3(3), 175-185.
- Mahendra, R., Rusli, B., & Adriaman, M. (2024). Pemenuhan Hak Pekerja Atas Pesangon yang tidak dibayarkan oleh Perusahaan Setelah Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan. *Sakato Law Journal*, 2(2), 37-44.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Akses*, 12(2), 97-108.
- Mayasari, V. F., & Sesung, R. (2025). Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab Dampak dan Mitigasi Hukum. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 689-698.
- Mozin, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Gorontalo. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 555-565.

- Mulyono, F. I., PN, S. S., & SM, A. H. (2025). Studi Kasus Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh pada Kasus Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). *Gorontalo Law Review*, 8(1), 139-156.
- Murtadho, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Preferen Dalam Pemberesan Proses Kepailitan. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 207-226.
- Muzaqqi, F. (2013). Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 3(1), 123-139.
- Nova, F. G. (2024). Keabsahan Permohonan Pailit dan PKPU oleh Pekerja sebagai Alternatif Penyelesaian Kegagalan Pembayaran Upah. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 27(01), 42-53.
- Nurdiannisa, A., & Loren, M. (2024). Analisis Hak Para Pekerja Dalam Perusahaan Yang Mengalami Kepailitan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2).
- Panjaitan, Hotma. "Perkembangan Konsep Kepailitan dan Reorganisasi dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 25, no. 3, 2018, pp. 412–430.
- Putra, F. M. K. (2014). Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan. *Perspektif*, 19(1), 1-19.
- Rahma, A. N., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Kasus Persamaan Merek Poskota dan Poskotaco (Studi Kasus Putusan No. 39/Pdt. Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst). *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 567-578.
- Riyadi, A. A., Az-zahra, A., Annugrah, G., Ardiaty, M., & Citra, H. (2025). Penerapan Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang-Piutang. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik E-ISSN: 3031-8882*, 3(1), 370-376.
- Rozaan, T. (2021). Analisis Yuridis Pemotongan Upah Tenaga Kerja Akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4. *Journal of Studia Legalia*, 2, 48-57.
- Saebani, A. R. (2024). Perlindungan Hukum Dan Upaya Pemulihan Bagi Perusahaan Insolven Dalam Kepailitan. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 92-100.

- Saputra, I. E. (2020). Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 155-166.
- Sari, A. R., & Joesoef, I. E. (2020). Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan. *Jurnal National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 233-254).
- Sari, I. P., & Yunus, A. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 403-413.
- Setiawan, I. B., & Gaol, S. L. (2024). Kedudukan Kreditor Separatis, Preferen, Konkuren, Pemegang Polis, dan Peserta dalam Pembagian Harta Pailit Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 32-40. *Private Law Review*, 9(1), 1-17.
- Shubhan, M. H. (2020). Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 519-539.
- Sianturi, M., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2023). Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(6), 751-760.
- Siregar, M. R. (2023). Pemanfaatan Aset Debitur Pasca Kepailitan: Menuju Peningkatan Nilai Ekonomi dan Manfaat Bagi Kreditor. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 1-15.
- Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. In *Forum Ilmiah* (Vol. 13, No. 1, pp. 51-59).
- Sukma, C. A., Citra, H., & Sommaliagustina, D. (2023). Kedudukan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 216-223.
- Sulistyo, N. J., & Dwiyatmi, S. H. (2019). Upah Pekerja Dalam Perusahaan Pailit (Kajian Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-VI/2008; 018/PUU-VI/2008 DAN 67/PUU-XI/2013). *Jurnal Ilmu Hukum*:

Alethea, 2(2), 115-130.

- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch). *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 7(1), 38-54.
- Tampemawa, S. G. (2019). Prosedur dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Privatum*, 7(6).
- Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 130-137.
- Warsito, L. (2024). Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan Dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 822-834.
- Widiastiani, N. S., & Sh, M. H. (2022). *Pengantar Hukum Perburuhan: Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja*. PT Kanisius, hlm 143.
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.
- Wijayanti, A. (2012). Menuju Sistem Hukum Perburuhan Indonesia Yang Berkeadilan. *Arena Hukum*, 6(3), 210-217.
- Wirajuna, A., Gultom, E., & Sudaryat, S. (2025). Konsekuensi Hukum Terhadap Kreditor Pailit Yang Tidak Mendaftarkan dan Terlambat Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Dalam Proses Verifikasi Piutang Kepailitan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(1), 302-309.

D. Lain-lain

- Alfajri, M. S. (2025). Peran Kurator Dalam Proses Penanganan Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. e-Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Retrieved <https://repository.unissula.ac.id/39721/>

- Arina Salsabila Munajat, A. S. M. (2023). *Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)(Studi Kasus Putusan No. 12/Pdt. Sus-Pkpu/2020/Pn. Smg Jo No. 21/Pdt. Sus Pailit/2020/Pn. Smg)* (Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Grup). e-Skripsi Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Grup. Retrieved <https://repository.undaris.ac.id/id/eprint/98>
- Barokah, A. Y. *Perlindungan Hukum Terhadap Upah Karyawan Dalam Kepailitan Suatu Perusahaan Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Utang.* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember]. e-Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember Retrieved https://digilib.uinkhas.ac.id/13874/1/Abu%20yazid%20barokah_S20152010
- Pramudita, M. Y. (2017). *Kedudukan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. e-Skripsi Universitas Islam Indonesia. Retrieved <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10223/01.0%20cover.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rifqi, A. F. (2020). *Akibat Hukum Pelepasan Hak Istimewa Oleh Corporate Guarantor terhadap Hak-hak Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. e-Skripsi Universitas Islam Indonesia. Retrieved <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26812/16410540%20Ahmad%20Faiq%20Rifqi.pdf?sequence=1>
- Sari, A. P. P., & Fauzi, E. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hal Pemberian Uang Kompensasi Setelah Berakhirnya Kontrak.* Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 1(4), 427-439. [Skripsi, Universitas Dharma Andalas]. e- Skripsi Universitas Dharma Andalas. Retrieved <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/579>

- Simbolon, S. J. S. (2025). *Analisis Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap Kedudukan Upah Terutang Dibandingkan Kreditur Separatis dalam Kepailitan Berdasarkan Teori Keadilan (Doctoral dissertation)*. Retrieved <https://repository.uksw.edu/items/ae7d17ae-ba55-4bb9-a50a4d9f159c948f>
- Tessalonika, T. (2025). Tinjauan Yuridis Atas Upah Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Uu No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. [Skripsi, Universitas HKBP Nommensen Medan]. e-skripsi Universitas HKBP Nommensen Medan. Retrieved <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/11920/Tessalonika.pdf>